

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik, perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (IKAPI,2009)

Perkembangan Akuntansi Pemerintah yang semakin pesat, disebabkan karena pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut. Tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga Internasional menyebabkan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem akuntansinya.

Melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 yang menganut basis kas menuju akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis akrual secara penuh.

Perubahan pokok dari penggunaan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual yaitu akuntansi berbasis kas menuju akrual mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi baik kas maupun non kas dan mencatat aset dan kewajiban.

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dibuatkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detail. Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual menjadi berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan untuk dasar membuat kebijakan publik yang semakin baik. Perubahan ini tidak secara otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secara kontinyu.

Pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam sistem pengendalian intern yang efektif diperlukan untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk dapat mencapai kesuksesan dalam penerapan SAP berbasis akrual diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut. Salah satu faktor tersebut adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan, dampak yang dihasilkan tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Berhasil atau tidak penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah tidak lepas dari peran sumber daya manusia termasuk pada BPKAD kabupaten Jombang. BPKAD kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. BPKAD kabupaten Jombang merupakan PPKD dan selaku entitas pelaporan.

Dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual permasalahan yang timbul dapat berakibat serius dalam jangka panjang. Permasalahan yang mungkin timbul yaitu keterbatasan dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki sehingga tidak memiliki cukup pegawai dengan kemampuan akuntansi yang baik, infrastruktur komunikasi dan teknologi yang terbatas dapat membatasi pilihan-pilihan dalam penerapan kebijakan SAP berbasis akrual. Oleh karena itu, penerapan SAP berbasis akrual dilakukan dengan menyusun kebijakan akuntansi akrual, melakukan pelatihan terhadap pengelola

keuangan SKPD, menyiapkan SDM yang kompeten melalui pelatihan dan sosialisasi serta penggunaan SIMDA keuangan yang sudah berbasis akrual. Karena itu perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Dukungan yang kuat dari pimpinan menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Karenaitu, perlu dilakukan penilaian tentang pemahaman pegawai terhadap SAP berbasis akrual sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan latarbelakang tersebut penelitian ini diberikan judul **EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JOMBANG.**

## **1.2 Penjelasan Judul**

Berdasarkan judul penelitian tersebut, dibawah ini merupakan penjelasannya :

1. Evaluasi adalah penilaian atau penafsiran secara teknis dan ekonomis terhadap suatu obyek. (KBBI, 2017)
2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu. (KBBI, 2017)
3. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. (KBBI, 2017 )

4. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (IKAPI, 2009)
5. Akrua Basis/Basis Akrua adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut (dan bukan hanya pada saat kas/setara kas diterima atau dibayar). (Halim,2007)
6. Menurut Peraturan Bupati Jombang No. 51 Tahun 2016, Bab II pasal 2, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang merupakan unsure penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Pemahaman tentang kondisi Penerapan SAP berbasis Akrua ini sangatlah penting. Karena dengan pemahaman yang baik, pemerintah dapat merencanakan langkah selanjutnya yang diperlukan agar tujuan dalam penerapan PP 71 Tahun 2010 dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, terdapat rumusan masalah sebagai berikut,

1. Sejauh mana SAP berbasis Akrua telah diterapkan oleh BPKAD kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pemahaman pegawai bagian akuntansi terhadap penerapan SAP berbasis Akrua pada BPKAD kabupaten Jombang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui sejauh mana SAP berbasis akrual telah diterapkan oleh BPKAD kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pegawai terhadap penerapan SAP berbasis Akrual pada BPKAD kabupaten Jombang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Manfaat tersebut antara lain,

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian–penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.
2. Bagi BPKAD kabupaten Jombang, penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan tambahan untuk upaya evaluasi dan peningkatan kinerja penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis Akrual. BPKAD kabupaten Jombang dapat mengetahui sejauh mana pegawai memahami SAP berbasis akrual.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan masukan tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini pengumpulan dan pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sumber Data

Data Primer, Penelitian ini menggunakan data-data primer sesuai topik pembahasan dengan cara melakukan peninjauan secara langsung kepada Instansi yang bersangkutan melalui wawancara.

Data Sekunder, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder atau data-data pendukung lainnya sebagai bahan referensi ataupun landasan teori untuk mendukung analisis terhadap data-data primer yang diperoleh dari Instansi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari buku-buku atau referensi-referensi.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang terkait yaitu Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas. Hasil wawancara tersebut dikumpulkan menjadi informasi yang akan digunakan sebagai bahan kajian penelitian. Berikut kisi-kisi pertanyaan dari wawancara :

1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang kewajiban pemerintah daerah dalam penerapan SAP Berbasis Akrual yang sudah harus diterapkan pada tahun 2015?

2. Apakah di BPKAD kabupaten Jombang sudah menggunakan SAP berbasis akrual secara penuh?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual pada BPKAD kabupaten Jombang?
4. Hal yang masih harus dilakukan pemerintah atau harapan kedepan terkait penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah daerah?
5. Apakah pemahaman pegawai bagian akuntansi memiliki peran penting dalam penerapan SAP berbasis Akrual pada BPKAD kabupaten Jombang?
6. Kendala yang dihadapi para pegawai dalam penerapan SAP berbasis akrual sedangkan mereka sudah terbiasa dengan sistem yang lama?

b. Observasi

Observasi adalah peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2014). Peneliti melakukan pengamatan langsung ke BPKAD Kabupaten Jombang.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat skema atau gambar yang didapat melalui wawancara. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail yang kemudian diuraikan agar mendapat gambaran yang jelas. Berikut ini tahapan yang dilakukan dalam mengelola data yang diperoleh :



1. Pengumpulan data, melakukan pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait.
2. Pengolahan data, setelah data di dapat selanjutnya akan dilakukan reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan (Sugiyono, 2015). Reduksi data dilakukan terhadap jawaban-jawaban yang diperoleh dari wawancara, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kata dan kalimat, memberikan keterangan tambahan dan menghilangkan keterangan yang tidak penting.
3. Penyajian data, penyajian data ini berbentuk uraian yang bersifat naratif diperoleh dari rangkuman hasil wawancara.
4. Setelah itu dapat ditarik suatu kesimpulan.